

BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 DESEMBER
2025

Jl. Pasir Putih II, Ancol Timur
Jakarta 14430

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 20 Januari 2026

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan,



Novi Susetyo Adi

BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

GEDUNG BRSDM KP.II, KOMPLEK BINA SAMUDERA

JALAN PASIR PUTIH I ANCOL TIMUR JAKARTA 14430 TELEPON (021) 64711583 (LACAK)
FAKSIMILE (021) 64700924 LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK sosek@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 20 Januari 2026
Kepala Balai Besar Riset
Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan,




Novi Susetyo Adi

Laporan Keuangan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp54,985,506.00 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp54,985,506.00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8,002,955,219.00 atau mencapai 99,02 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 8,081,921,000.00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025 .

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp686,286,718,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp9,010,467.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp677,276,251.00; Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp686,286,718.00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp9,139,072,565.00

sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp(9,139,072,565.00). Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp54,985,506 dan Rp0,00. Sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (9,084,087,059.00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp 852,235,564.00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(9,084,087,059.00) kemudian ditambah dengan koreksi lain – lain sebesar Rp0.00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 8,918,138,213.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 686,286,718.00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	54.985.506	0,00	58.250.678
JUMLAH PENDAPATAN		-	54.985.506	0,00	58.250.678
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	6.715.106.000	6.637.001.801	98,84	7.133.211.739
Belanja Barang	B.4	1.366.815.000	1.365.953.418	99,94	3.845.903.210
Belanja Modal	B.5	-	-		-
Pinjaman dan Hibah					
JUMLAH BELANJA		8.081.921.000	8.002.955.219	99,02	10.979.114.949

**BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	2025	2024
ASET				
ASET LANCAR				
	Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1		-
	Kas di Bendahara Penerimaan	C.2		-
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.3		-
	Piutang PNBP	C.4		-
	Piutang Bukan Pajak	C.5	7.262.982	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.6	(36.315)	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7		-
	Belanja Dibayar di Muka	C.8		-
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.9		-
	Persediaan	C.10	1.783.800	26.742.490
	Jumlah Aset Lancar		9.010.467	26.742.490
PIUTANG JANGKA PANJANG				
	Tagihan TP/TGR	C.11		-
	Tagihan Penjualan Angsuran	C.12		-
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13		-
	Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP				
	Tanah	C.14		-
	Peralatan dan Mesin	C.15	5.240.245.141	5.536.967.016
	Gedung dan Bangunan	C.16		-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17		-
	Aset Tetap Lainnya	C.18	517.203.788	517.203.788
	Konstruksi dalam pengerjaan	C.19		-
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(5.080.172.678)	(5.228.677.730)
	Jumlah Aset Tetap		677.276.251	825.493.074
ASET LAINNYA				
	Aset Tak Berwujud	C.21	15.675.000	15.675.000
	Aset Lain-Lain	C.22		-
	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(15.675.000)	(15.675.000)
	Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET			686.286.718	852.235.564
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN				
	Uang Muka dari KPPN	C.24		-
	Utang kepada Pihak Ketiga	C.25		-
	Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26		-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN				-
EKUITAS				
	Ekuitas	C.27	686.286.718	852.235.564
JUMLAH EKUITAS			686.286.718	852.235.564
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			686.286.718	852.235.564

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

1. (Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1		
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6.629.738.819	7.133.211.739
Beban Persediaan	D.3	43.199.090	171.591.879
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.107.212.954	2.014.207.415
Beban Pemeliharaan	D.5	155.832.014	509.132.779
Beban Perjalanan Dinas	D.6	54.836.550	1.139.662.482
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7		
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	148.216.823	253.295.882
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	36.315	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		9.139.072.565	11.221.102.176
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(9.139.072.565)	(11.221.102.176)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			-
Pendapatan pelepasan Aset Non Lancar	D.12	(54.440.819)	(5.830.492)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.13		(121.040.460)
SURPLUS /DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR	D.14	54.440.819	(115.209.968)
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	D.15	544.687	42.940.186
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	D.16	-	-
Defisit Selisih	D.17	-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.18	(544.687)	(42.940.186)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL	D.19	54.985.506	(72.269.782)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(9.084.087.059)	(11.293.371.958)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(9.084.087.059)	(11.293.371.958)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-25	31-Dec-24
EKUITAS AWAL	E.1	852.235.564	1.224.695.851
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(9.084.087.059)	(11.293.371.958)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN	E.3		
Penyesuaian Nilai Aset	E.4		
Penyesuaian Nilai Kewajiban	E.5		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.6		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.7		
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.8		
KOREKSI NILAI REKLASIFIKASI	E.9		
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.10		
KOREKSI LAIN-LAIN	E.11		47.400
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.12	8.918.138.213	10.920.864.271
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS	E.13	(372.460.287)	(372.460.287)
EKUITAS AKHIR		686.286.718	852.235.564

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) merupakan salah satu unit kerja eselon II pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab kepada Badan Riset Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). BBRSEKP menurut PERMEN KP No.72/PERMEN-KP/2020, menjadi unit kerja yang memiliki tugas dalam melaksanakan penelitian di bidang sosial ekonomi, budaya, dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab kepada lingkup Eselon I yaitu BPPSDM KP, maka BBRSEKP memiliki suatu kewajiban dalam melaksanakan pelaporan keuangan.

Sesuai Peraturan Menteri KP Nomor: 72 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan memiliki tugas melaksanakan penelitian di bidang sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, BBRSEKP menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

1. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
2. Perumusan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan riset dibidang ekonomi makro, inventarisasi dan tata kelola sosial ekonomi sumber daya, sistem usaha dan pemasaran produk, inkubasi bisnis dan alih teknologi, sosial budaya masyarakat, komunikasi, serta politik dan hukum kelautan dan perikanan;

4. Pelaksanaan tata laksana, sarana, dan pelayanan jasa riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
5. Pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Tugas dan fungsi yang diemban tersebut merupakan salah satu indikator perubahan nomenklatur dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kepala BBRSEKP dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, serta pengelolaan prasarana dan sarana. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi yaitu pelaksanaan urusan kearsipan dan persuratan, rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan kebutuhan prasarana dan sarana serta pengelolaan aset.

b. Koordinator

Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator menjalankan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program dan anggaran, pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan;
- 2) Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan;
- 3) Pengelolaan urusan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, dan tata laksana;
- 4) Perumusan kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan, Pelaksanaan analisis kebijakan dibidang ekonomi makro, investarisasi dan tata kelola sosial ekonomi sumberdaya, sistem usaha dan pemasaran produk, inkubasi bisnis dan ahli teknologi,

sosial budaya masyarakat, politik dan hukum kelautan dan perikanan;

- 5) Komunikasi dan Kerjasama semua pihak yang mendukung kegiatan sosial ekonomi;
- 6) Pelaksanaan publikasi hasil, dan monitoring dan evaluasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
- 7) Pelaksanaan tata laksana, sarana, dan informasi pelayanan jasa sosial ekonomi kelautan dan perikanan serta Pengelolaan data dan informasi.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan manajerial di bidang ekonomi makro, inventarisasi dan tata kelola sosial ekonomi sumberdaya, sistem usaha dan pemasaran produk, inkubasi bisnis dan ahli teknologi, sosial budaya masyarakat, komunikasi, politik dan hukum kelautan dan perikanan, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

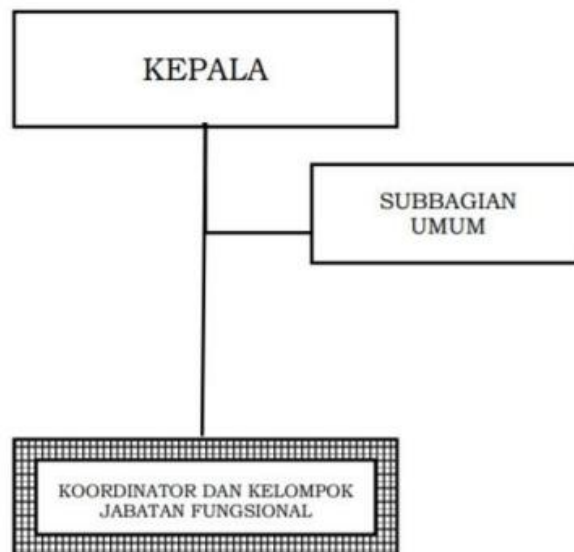
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- 1) Arsiparis, Pranata Komputer, Analis Sosial Ekonomi, Pustakawan, dan Jabatan Fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Kepala;
- 3) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur organisasi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan sesuai Peraturan Menteri Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti terlihat pada gambar 1.

Gambar 1 . Struktur Organisasi BBRSEKP

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN



Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 merupakan acuan dan arahan bagi BBRSEKP dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam periode waktu lima tahun secara menyeluruh terintegrasi dan sinergis. Renstra BBRSEKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang mengacu pada Undang-Undang Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Nasional (2020-2024), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025.

Peran strategis Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebagai institusi riset yang menghasilkan rekomendasi kebijakan social ekonomi kelautan dan perikanan sebagai dasar pengambilan keputusan para pemangku kebijakan (science based policy) yaitu kebijakan pembangunan berbasis pada riset dan inovasi. Konsep ini merupakan bagian dari tahapan visi presiden 2020-2024: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong – royong.

1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi KKP ini merupakan perwujudan Visi Presiden terpilih menetapkan visi 2020 – 2024 dalam sektor kelautan dan perikanan.

BPPSDMKP sebagai unit eselon 1 KKP mempunyai visi untuk mendukung visi KKP. Visi BPPSDMKP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong – royong.

BBRSEKP yang merupakan unit di bawah BPPSDM mempunyai visi yang lebih spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BBRSEKP. Tugas dan fungsi BBRSEKP adalah melaksanakan kegiatan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Visi yang diusung oleh BBRSEKP ini tetap mendukung Visi BPPSDM dan Visi KKP. Oleh karena itu visi BBRSEKP 2020 – 2024 adalah

“Menjadi Lembaga Riset Terkemuka Penghasil Rekomendasi Kebijakan dan Inovasi Rekayasa Sosial Ekonomi dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”

Visi tersebut mengandung kata-kata kunci yang dijabarkan sebagai berikut:

Lembaga Riset Terkemuka Penghasil Rekomendasi Kebijakan adalah Lembaga riset yang:

1. Menciptakan iklim riset yang konsinten dan melahirkan hasil-hasil berupa rekomendasi kebijakan yang berdampak pada pengigkatan mutu kebijakan di sector kelautan dan perikanan.
2. Menjadikan hasil-hasil riset sebagai dasar dalam penyelenggaraan kebijakan pembangunan di sektor KP.

Terkemuka adalah menjadi pelopor dan rujukan utama dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Inovasi Rekayasa Sosial Ekonomi adalah menghasilkan kebaruan-kebaruan hasil riset yang dapat diimplementasikan dengan mempertahankan keberlanjutan SDKP untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat KP

2. Misi

Misi BRSEKP mengacu pada misi BPPSDM yang menjalankan misi Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan yaitu:

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Misi BBRSEKP merupakan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi BBRSEKP, meliputi:

1. Menyediakan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing usaha kelautan dan perikanan melalui riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan inovasi rekayasa sosial;
2. Menyediakan rekomendasi kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan inovasi rekayasa sosial; dan
3. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBRSEKP.

3. Tujuan

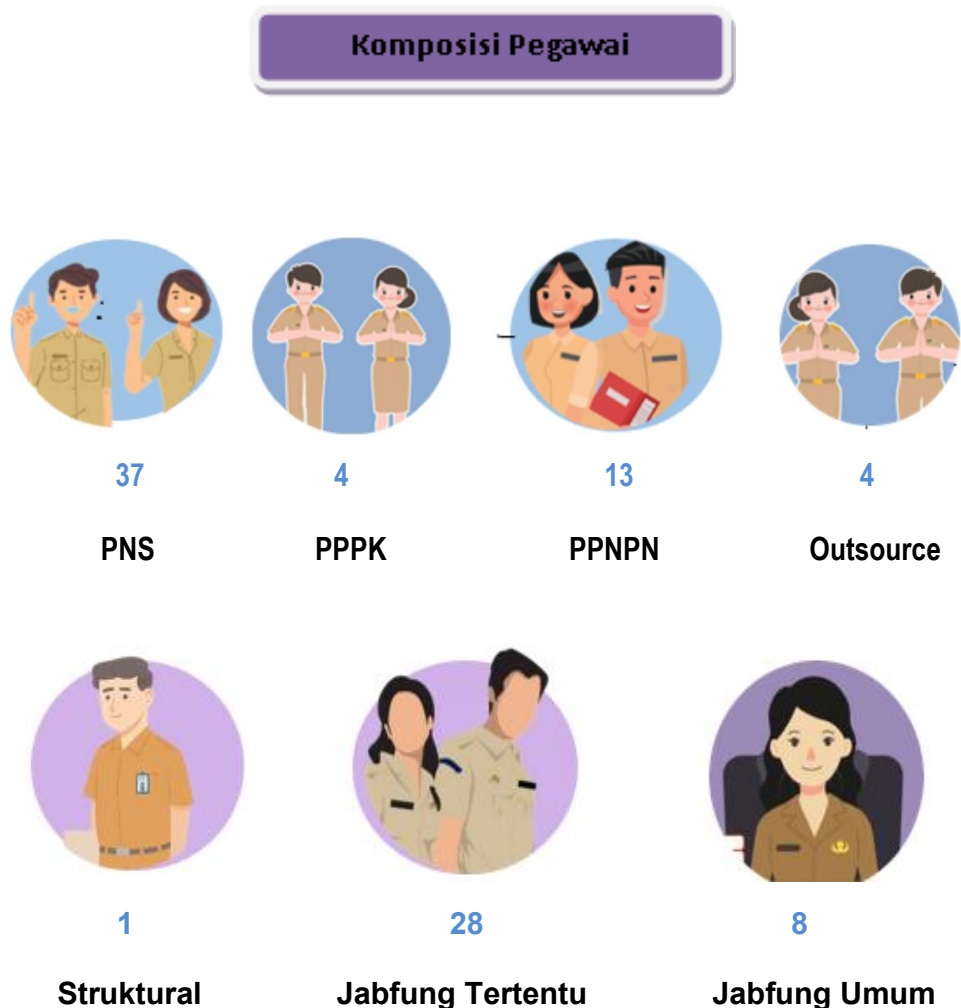
Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BBRSEKP, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan rumusan kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan sebagai landasan kebijakan kelautan dan perikanan (science based policy);
2. Menghasilkan model sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan;
3. Menghasilkan penerapan model integrasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang mendukung peningkatan peran adopsi teknologi terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan;

A.2. KERAGAMAN SDM BBRSEKP

“Sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam mencapai tujuannya tentu suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem, agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaanya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, dan motivasi”

Pada tahun 2023, kualitas SDM pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu mengembangkan, memperbaiki, dan memperkenalkan berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan memiliki 58 orang pegawai yang terdiri dari 37 PNS, 4 PPPK, 13 PPNP dan 4 Tenaga Outsourcing. Komposisi dari pegawai BBRSEKP sebagai berikut :



Gambar 2. Keragaan SDM BBRSEKP

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya, diantaranya adalah

a. Perpustakaan

Perpustakaan BBRSEKP merupakan salah satu sarana penunjang kegiatan penelitian, dalam rangka peningkatan kualitas serta tugas dan fungsi BBRSEKP. Perpustakaan BBRSEKP telah menjalankan perannya sebagai pusat penyediaan informasi berupa bahan pustaka, bahan rujukan, penyedia literatur untuk meningkatkan kompetensi peneliti BBRSEKP. Koleksi perpustakaan BBRSEKP terdiri dari buku referensi, buku hasil penelitian, koleksi digital (e-books, e-journals), koleksi audiovisual dan lain-lain. Selain itu untuk

meningkatkan pelayanannya, perpustakaan BBRSEKP masih terus mengembangkan system perpustakaan digital (<http://bbpse.litbang.kkp.go.id/perpustakaan>)

Pengembangan perpustakaan digital dimaksudkan agar layanan perpustakaan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pengguna khususnya pegawai BBRSEKP selain itu kerjasama antar perpustakaan dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi khususnya unit kerja yang ada untuk dapat melaksanakan “resource sharing” dapat terjalin.

b. Laboratorium Sosial Ekonomi

Untuk mewujudkan Balai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebagai Center of excellent dalam lingkup manajemen hasil penelitian dan pengelolaan data sosial ekonomi kelautan dan perikanan, saat ini BBRSEKP sedang dalam tahap pembangunan Laboratorium Sosial Ekonomi. Laboratorium Sosial Ekonomi adalah sebuah pusat manajemen dan sistem komputasi data sosial ekonomi kelautan dan perikanan untuk optimalisasi peran institusi di dalam perencanaan dan pengembangan ekonomi dan masyarakat kelautan dan perikanan.

Kegiatan utama yang dilakukan Laboratorium Sosial Ekonomi adalah (1) penyebarluasan informasi dan hasil penelitian; (2) mengembangkan model komputasi penelitian sosial ekonomi yang mendukung pengembangan masyarakat dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dan (3) pelayanan konsultasi dan penelitian serta penanganan masalah masalah sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

c. Sarana dan prasarana lainnya

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan tidak memiliki aset berupa tanah dan gedung/bangunan. Kantor yang ditempati adalah kantor milik Sekretariat BPPSDMKP yaitu di Gedung BPPSDMKP II di Jalan Pasir Putih 1 Ancol Jakarta Utara. Sarana dan prasarana lainnya yang dimiliki dan dikelola meliputi sarana dan prasarana riset yang terdiri atas: kendaraan operasional, laptop/komputer, kamera/handycam /alat perekam lainnya, perpustakaan, laboratorium data, software pengolah data; dan sarana dan prasarana non riset yang terdiri atas kendaraan

pimpinan, meubelair, dan peralatan perkantoran lainnya. Sarana dan prasarana di atas merupakan bagian dari aset/barang milik negara (BMN). Dalam rangka akreditasi dan penguatan laboratorium sosial ekonomi, dukungan sarana dan prasarana akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan laboratorium sosial ekonomi untuk mengoptimalkan peran intitusi sebagai penyedia data dan informasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

**Pendapatan-
LRA**

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**Pendapatan-
LO**

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan

belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

A. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

B. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,

dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan
Aset tetap

C. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

D. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari

12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

E. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan asset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak kekayaan intelektual.
- Aset tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia, Dagang, Desain tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas	20
Tanaman Semusim	
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Petunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6). Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di

Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7). Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berdasarkan
Akrual
Pertama Kali

(8). Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satker Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pagu sebesar Rp8,081,921,000.00

Sehingga pagu Anggaran terlihat sebagai berikut ini:

Uraian	2025
	Anggaran
Belanja	
Belanja Pegawai	6.715.106.000,00
Belanja Barang	1.366.815.000,00
Belanja Modal	-
Jumlah Belanja	8.081.921.000,00

Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah
Rp54,985,506

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 54,985,506.00 atau mencapai 0 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Pendapatan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan terdiri dari Pendapatan lain-lain dan Pendapatan Lain-lain II. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBPN 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	(%)
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	54.985.506	-
Pendapatan Anggaran Lain - Lain	-		
Jumlah	-	54.985.506	-

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	54.985.506	58.250.678	(5,61)
Jumlah	54.985.506	58.250.678	(5,61)

Realisasi Pendapatan TA 2025 adanya pendapatan pengembalian belanja pegawai tahun yang lalu merupakan dari pengembalian Belanja Pegawai, pengembalian Belanja Barang, Pendapatan penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 54,985,506.00 terdiri dari:

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp544.687,00
Berupa pengembalian belanja kelebihan Tunjangan Umum pegawai. Dan pengembalian belanja tunjangan fungsional pegawai
- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 54.440.819,00
Berupa penjualan lelang peralatan dan mesin.

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp54.985.506,00 dan Rp58.250.678,00 . Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	54.985.506	58.250.678	(5,61)
Jumlah	54.985.506	58.250.678	(5,61)

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Rincian PNBP Lainnya

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	544.687	16.214.094	-96,64
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	54.440.819	5.830.492	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL		36.206.092	0,00
Jumlah	54.985.506	58.250.678	(5,61)

Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami penurunan sebesar 5,61 % dari TA 2024 dikarenakan tidak banyak adanya penerimaan kembali belanja pegawai TAYL serta Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin.

Realisasi Belanja
Rp 8,002,955,219

B.2. Belanja Negara

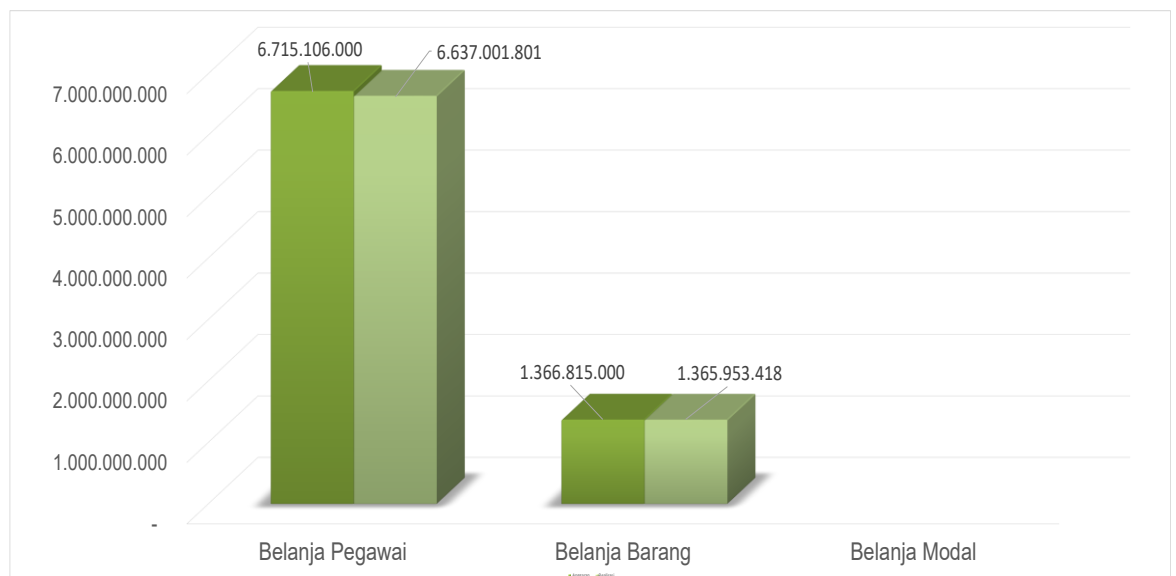
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp 8,002,955,219.00 atau 89,74% dari anggaran belanja sebesar Rp 8,081,921,000.00 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. *Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025*

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Pegawai	6.715.106.000	6.637.001.801	98,84
Belanja Barang	1.366.815.000	1.365.953.418	99,94
Belanja Modal	-		0,00
Jumlah Belanja Kotor	8.081.921.000	8.002.955.219	99,02
Blokir Anggaran	-		
Pengembalian Belanja		0	
Jumlah Belanja Netto	8.081.921.000	8.002.955.219	99,02

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Gambar 1. Grafik Realisasi Belanja Tahun 2025

Dibandingkan dengan TA 2025, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 17.52 %

Tabel 10. *Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	6.715.106.000	7.133.211.739	-5,86
Belanja Barang	1.366.815.000	3.845.903.210	-64,46
Belanja Modal			
Jumlah	8.081.921.000	10.979.114.949	-26,39

Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 26,39 % dibandingkan pada TA 2024. Hal ini disebabkan:

1. Pengurangan Belanja Pegawai untuk 2 Orang dan perubahan Tunjangan Kinerja Pegawai mengalami penurunan 5,86%
2. Adanya Inpres 1 Tahun 2025 terkait Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025

*Belanja Pegawai
Rp6.715.106.000*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.715.106.000 dan Rp7.133.211.739 . Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami penurunan sebesar 5,86 % dari TA 2024 Hal ini disebabkan oleh antara lain adanya pengurangan belanja pegawai dikarenakan mutasi pegawai.

Tabel 11. *Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024*
(Dalam Rupiah)

Uraian	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	1.900.115.200	2.134.103.240	(10,96)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.649	29.974	(11,09)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	141.513.100	156.544.790	(9,60)
Belanja Tunj. Anak PNS	45.164.866	49.663.290	(9,06)
Belanja Tunj. Struktural PNS	29.970.000	28.350.000	5,71
Belanja Tunj. Fungsional PNS	330.251.000	358.297.000	(7,83)
Belanja Tunj. PPh PNS	25.077.467	22.997.046	9,05
Belanja Tunj. Beras PNS	96.753.120	112.830.360	(14,25)
Belanja Uang Makan PNS	254.622.000	219.092.000	16,22
Belanja Tunjangan Umum PNS	12.745.000	20.850.000	(38,87)
Belanja Uang Lembur	4.317.000	18.476.000	(76,63)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja)	3.186.703.508	3.511.165.563	(9,24)
Belanja Gaji Pokok PPPK	237.458.000	174.574.400	36,02
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.864	4.016	21,12
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	13.172.610	8.487.360	55,20
Belanja Tunjangan Anak PPPK	3.107.930	1.600.928	94,13
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	27.720.000	27.720.000	-
Belanja Tunjangan Beras PPPK	12.456.240	8.111.040	53,57
Belanja Uang Makan PPPK	47.373.150	26.123.000	81,35
Belanja Uang Lembur PPPK	4.109.000	3.694.000	
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	342.989.983	250.497.732	36,92
Jumlah Belanja kotor	6.715.650.687	7.133.211.739	(5,85)
Pengembalian Belanja Pegawai	544.687	330	164.956,67
Jumlah Belanja	6.715.106.000	7.133.211.409	(5,86)

Belanja pegawai Rp6,715,106,000.00 terdiri dari Belanja Pegawai PNS dan Belanja Pegawai PPPK

Belanja Barang
Rp 1,365,953,418

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1,365,953,418 dan Rp 3,845,903,210 Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

Tabel 12. Perbandingan belanja barang tahunan (Unaudited)
TA 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional Lainnya	644.655.904	1.541.025.615	-58,17
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6.790.000	84.650.000	-91,98
Belanja barang Persediaan Barang Konsumsi	18.240.400	182.900.534	-90,03
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bang	0	168.365.000	-100,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin	155.832.014	340.767.779	-54,27
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	54.836.550	1.147.793.016	-95,22
Belanja Sewa	2.100.000	12.600.000	
Belanja Jasa	483.498.550	375.931.800	
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.365.953.418	3.854.033.744	-64,56
Pengembalian Belanja Barang	0	8.130.534	
Jumlah Belanja	1.365.953.418	3.845.903.210	-64,48

Realisasi tersebut mengalami penurunan 64,48 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2025. Hal ini disebabkan

1. Adanya Inpres 1 Tahun 2025 terkait Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025

Belanja Modal Rp.
0,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 00,00 . Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 13. Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	
Belanja Modal Lainnya	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	0	0	
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	

Tidak terdapat belanja modal untuk sarana dan prasarana.

Belanja Modal B.5.1 Belanja Modal. Peralatan dan Mesin

peralatan dan Mesin Rp0,00 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, mengalami penurunan sebesar 0 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Realisasi belanja modal peralatan dan mesin rendah dibanding periode sebelumnya karena secara persentase terhadap pagu anggarannya, lebih rendah daripada periode sebelumnya

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Peralatan kantor dan alat rumah tangga	0	0	0
Alat angkut	0	0	0
Peralatan laboratorium	0	0	0
Peralatan komputer	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh penuruanan anggaran atau tidak terdapat mutasi tambah pada Peralatan dan Mesin

B.5.2 Belanja Modal lainnya

Belanja Modal Lainnya sebesar Rp.0,00 Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 , mengalami penurunan

sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan adanya penurunan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya dan Realisasi belanja modal peralatan dan mesin rendah dibanding periode sebelumnya karena secara persentase terhadap pagu anggarannya, lebih rendah daripada periode sebelumnya

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Tidak terdapat mutasi BMN berupa Aset Tak Berwujud terdapat pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp0,00 dan Rp.000. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 16. *Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024*

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2023
Saldo Menurut Rekening Koran	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
BP Uang Muka/Voucher	-	-
Kuitansi UP	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak
Rp7.262.982,00

C.1.2 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing- masing sebesar adalah Rp7.262.982,00 dan Rp.0,00. Adalah Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Makan ASN dan pengembalian potongan tunjangan kinerja bulan Desember Tahun 2025 yang di setor ke kas negara di Tahun 2026.

Tabel 17. Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2025 dan 2024

Rincian	2025	2024
Piutang PNPB	-	-
Piutang Lainnya	7.262.982	-

Penyisihan Piutang Tidak
tertagih
Rp36.315,00

C.1.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Nilai penyisihan Piutang Tidak tertagih – Piutang Bukan pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing- masing Rp36.315,00- dan Rp0,-, Penyisihan Piutang Tidak tertagih - piutang lancar ditentukan oleh kualitas piutang.

Tabel 18. Rincian Penyisihan Piutang Tidak tertagih TA 2025 dan 2024

Rincian	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai
Piutang Bukan Pajak	-	-	
Lancar	7,262,982	0.5 %	36.315
Kurang lancar			
Diragukan			
Jumlah	7,262,982	0.5 %	36.315

Persediaan
Rp26.742.490

C.1.3. Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.783.800,- dan Rp Rp26.742.490. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Barang Konsumsi (117111)	1.783.800	26.742.490
Suku Cadang (117114)	-	-
Jumlah	1.783.800	26.742.490

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Penurunan nilai persediaan Barang Konsumsi ini dapat mencerminkan beberapa kemungkinan, antara lain:

- Efisiensi dalam penggunaan barang konsumsi selama tahun berjalan.
- Penyesuaian volume pengadaan berdasarkan kebutuhan aktual.
- Kebijakan pengendalian persediaan untuk mengurangi potensi pemborosan atau penumpukan barang.

Secara keseluruhan, tren penurunan nilai persediaan menunjukkan adanya pengelolaan yang lebih selektif dan efisien terhadap aset lancar, sejalan dengan upaya optimalisasi anggaran dan peningkatan efektivitas operasional.

Mutasi Persediaan pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Mutasi Persediaan pada 31 Desember 2025

URAIAN	NILAI
SALDO AWAL, Per 31 Des 2024	26.742.490
Barang Habis Pakai	
Persediaan utk Diserahkan kpd Masyarakat/Pemda	
Mutasi Tambah	18.240.800
a) Pembelian	18.240.800
- Barang Habis Pakai	18.240.800
- Selisih Reklas Masuk dan Reklas Keluar	
- Persediaan utk Diserahkan kpd Masyarakat/Pemda	
Mutasi Kurang	- 43.199.490
Pemakaian	-43.199.490
Rusak/Usang	
Diserahkan kepada Pemda	
SALDO AKHIR Per 31 Desember 2024	1.783.800

Saldo awal Barang Habis Pakai per 31 Desember 2024 senilai **Rp26.742.490,00** berupa alat tulis, penjepit kertas, penghapus/korektor, ordner dan map, penggaris, cutter (alat tulis kantor), alat perekat, alat tulis kantor lainnya, berbagai kertas, kertas dan cover lainnya, - terdapat pembelian Barang Habis Pakai senilai **Rp18.240.800,00** berupa alat tulis, penjepit kertas, penghapus/korektor, ordner dan map, penggaris, alat perekat, alat tulis kantor lainnya, berbagai kertas, kertas dan cover lainnya, usb/flash disk. Terdapat pemakaian barang Habis pakai barang konsumsi yang digunakan untuk kegiatan operasional kantor selama periode per 31 Desember 2025 senilai **Rp43.199.490,00** dan Saldo Akhir senilai **Rp1.783.800,00** berupa alat tulis, penjepit kertas, penghapus/korektor, ordner dan map, penggaris, cutter (alat tulis kantor), alat perekat, alat tulis kantor lainnya, berbagai kertas, kertas dan cover lainnya. Semua persediaan dalam keadaan baik.

C.4. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp5.240.245.141,00 dan Rp5.536.967.016,00. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 20. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo Per 31 Desember 2024	5.536.967.016
Mutasi Tambah	-
Pembelian (101)	
Transfer Masuk (102)	-
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (105)	-
Pengembangan Nilai Aset	
Mutasi Tambah Penunjang Operasional	
Pengembangan melalui KDP	-
Mutasi Kurang	296.721.875
Penghapusan BMN	127.223.950
Transfer Keluar	169.497.925
Saldo Per 31 Desember 2025	5.240.245.141
Akumulasi Penyusutan	-5.080.172.678

Terdapat mutasi kurang periode sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp296.721.875,00 pada Peralatan dan mesin hal ini disebabkan sebagai berikut:

- Pada Satker BBRSEKP selama Tahunan Tahun 2025 melakukan transfer keluar pada aset tetap dengan nama barang peralatan dan mesin berupa PickUp ke Politeknik Karawang dengan BAST Nomor B.45/BBRSEKP/PL.450/II/2025 dengan nilai perolehan Rp.167.446.000,00-
- Transfer Keluar Peralatan dan Mesin berupa Lemari Besi/Metal ke Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP dengan BAST Nomor B.1138/BBRSEKP/PL.750/XI/2025 dengan nilai perolehan Rp 2.051.925,-
- Melakukan penghapusan Kendaraan Roda 2 sebanyak 1 Unit dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 1872/KEPMEN-KP/PL.750/XII/2025 tentang Penghapusan BMN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan pada tanggal 10 Desember 2025 dengan nilai perolehan Rp

16.868.950,-

d. Melakukan penghapusan Kendaraan Roda 4 sebanyak 1 Unit dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 1873/KEPMEN-KP/PL.750/XII/2025 tentang Penghapusan BMN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kefautan dan Perikanan Pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan pada tanggal 10 Desember 2025 dengan nilai perolehan Rp110.355.000,-

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.080.172.678,00 sehingga Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 senilai **Rp160.072.463,00**

*Aset Tetap Lainnya
Rp517,203,788*

C.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp517,203,788 dan Rp517,203,788. Aset tetap tersebut. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai
SALDO AWAL, Per 31 Des 2024	517.203.788
Normalisasi Data	
Mutasi Tambah	-
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	
Mutasi Kurang	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	517.203.788

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

- Bahan Perpustakaan sejumlah 12 paket dengan nilai sebesar Rp517.203.788,00 dengan mutasi tambah sejumlah 0 paket senilai Rp0,00 dan mutasi kurang sejumlah 0 paket dengan nilai sebesar Rp0,00 sehingga nilai buku menjadi Rp517.203.788,00.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(5.080.172.678)

C.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing – masing Rp(5.080.172.678) dan Rp(5.228.677.730). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2025 dan 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5.240.245.141	-5.080.172.678	160.072.463
2	Aset Tetap Lainnya	517.203.788		517.203.788
	Akumulasi Penyusutan	5.757.448.929	-5.080.172.678	677.276.251

Aset tak berwujud
Rp15.675.000,00

C.7. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp15.675.000 dan Rp15.675.00,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan berupa Software. Adapun rincian mutasi ATB adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Jenis – Jenis Aset Tak Berwujud pada Balai Besar Riset
Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
per 31 Desember 2025

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai
162151	Software Komputer	10	Rp 15.675.000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	Rp -
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan (Software Komputer)	0	Rp -
Nilai Perolehan per 31 Desember 2025		10	Rp 15.675.000

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai
SALDO AWAL, Per 31 Des 2024	15.675.000
Normalisasi Data	-
Mutasi Tambah:	
Pembelian	-
Mutasi Kurang	-
Saldo Per 31 Desember 2025	15.675.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(15.675.000)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	-

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.675.000,00, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp15.675.000,00, mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebesar Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp15.675.000,00** dengan nilai buku sebesar **Rp0,00**.

*Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(15.675.000,00)*

C.8. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp (15.675.000,00) dan Rp(15.675.000) . Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi

Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Akumulasi
Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	15.675.000	15.675.000	0
ATB Lainnya	0	0	0
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	0	0
Operasional Pemerintahan	15.675.000	15.675.000	0
Aset Lain lain	0	0	0
Jumlah	15.675.000	15.675.000	0

Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.675.000,00 dengan nilai buku sebesar Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN
Rp0,00

C.10. Uang Muka Dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas
Rp686.286.718,00

C.11. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp686,286.718,00 dan Rp852,235,564.00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Pendapatan
PNBP
Rp0,00

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami dari tahun sebelumnya sebesar Rp0,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 26 *Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024*

Uraian	2025	2024	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Pegawai

Rp 6,629,738,819

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 6,629,738,819 dan Rp7.133.211.739,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27. *Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024*

Uraian Jenis Beban	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	6.629.738.819	7.133.211.739	(7,06)
Belanja Lembur			-
Jumlah	6.629.738.819	7.133.211.739	(7,06)

Beban Pegawai Tahun 2025 terjadi penurunan sebesar 7,04 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan adanya Pengurangan pegawai PNS karena adanya mutasi pegawai.

Beban Persediaan
Rp 43,199,090

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 43,199,090 dan Rp171.591.879,0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 28. *Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024*

Uraian Jenis Beban	TA. 2025	TA. 2024	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	43.199.090	171.591.879	(74,82)
Beban Persediaan bahan baku			
Jumlah Beban Persediaan	43.199.090	171.591.879	(74,82)

Beban persediaan terjadi kenaikan sebesar 74,82 % persen karena adanya efisiensi anggaran.

Beban Barang dan
Jasa
Rp2,107,212,954

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing – masing sebesar Rp 2,107,212,954 dan Rp2.014.207.415,00. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 29. *Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024*

Uraian Jenis Beban	TA. 2025	TA. 2024	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	499.596.264	1.124.213.984	(55,56)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	79.360.000	110.240.000	(28,01)
Beban Barang Operasional Lainnya	59.805.640	112.548.981	(46,86)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	0	-
Beban Bahan	5.894.000	194.022.650	(96,96)
Beban Honor Output Kegiatan	0	55.450.000	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	6.790.000	29.200.000	(76,75)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	-
Beban Sewa	2.100.000	12.600.000	(83,33)
Beban Jasa Profesi	8.100.000	233.900.000	(96,54)
Beban Jasa Lainnya	1.445.567.050	142.031.800	917,78
Beban Jasa Penanganan Pandemi COVID19	0	0	
Jumlah Beban Barang dan Jasa	2.107.212.954	2.014.207.415	4,62

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami **kenaikan** sebesar **4,62** persen dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh Pada Tahun 2024 mengalami Pagu Blokir sehingga beberapa Beban Barang dan Jasa tidak berjalan dengan optimal. Sedangkan Tahun 2025 mengalami efisiensi anggaran yang menyebabkan tidak banyak beban barang dan jasa yang dikeluarkan.

Beban Pemeliharaan
Rp155,832,014.00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 155,832,014.00 dan Rp509.132.779,00

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. *Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	155.832.014	168.365.000	-7,44
Beban pemeliharaan lainnya	0	340.767.779	-100,00
Jumlah	155.832.014	509.132.779	-69,39

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 69,39 % dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan tidak adanya anggaran biaya pemeliharaan gedung dan bangunan.

Beban Perjalanan Dinas

Rp 54,836,550

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 54,836,550.00 dan Rp1.139.662.482,00

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 31. *Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	10.434.500	674.856.610	-98,45
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.470.000	187.300.000	-91,74
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	28.932.050	277.505.872	-89,57
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	68.400.000	
Jumlah	54.836.550	1.139.662.482	-95,19

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami **penurunan** sebesar **95,19 %** dikarenakan adanya Inpres mengenai efisiensi anggaran.

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp 148,216,823

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 148,216,823 dan Rp253.295.882.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. *Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	148.216.823	244.910.573	-39,48
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	-	5.330.059	
Jumlah Penyusutan	148.216.823	250.240.632	-40,77
Beban Amortisasi Software	0	3.055.250	-100,00
Jumlah Amortisasi	-	3.055.250	-100,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	148.216.823	253.295.882	-41,48

Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami **penurunan** sebesar 41,48 % disebabkan oleh penghapusan Aset di Tahun 2025

*Beban Pelepasan
Aset non Lancar
Rp 54.440.819*

D.8 Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing – masing sebesar Rp54.440.819,00 dan Rp115.209.968,00

Tabel 33. Rincian pendapatan Pelepasan aset Non lancar
Tahun 2025 dan Tahun 2024:

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024	%
Penghapusan ATL	-	(121.040.460)	#DIV/0!
Pendapatan Pelepasan Aset	54.440.819	5.830.492	
Jumlah	54.440.819	-115.209.968	- 211,62

Pendapatan Pelepasan aset sebesar Rp54.440.819,00 merupakan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan dan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan dan pelepasannya.

Pelepasan Aset Tetap Lainnya berupa Mobil Avanza dan Motor Honda yang dijual melalui proses lelang oleh KPKNL.

Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp 544,687

D.9. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp544.687 dan Rp42.940.186

Tabel 34 *Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional*
TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024	%
Penerimaan Kembali Beban PegawaiTahun Anggaran yang Lalu	544.687	42.940.186	-98,73
	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	544.687	42.940.186	-98,73

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) mulai tahun 2019

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0,00
Rp 36.315

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp36.315,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 30 Desember 2025 dan 2024 dapat disajikan Tabel berikut ini:

Tabel 35. Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih

Uraian Jenis Beban	Realisasi T.A. 2025	Realisasi T.A. 2024
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	36.315	-
Total	36.315	-

Merupakan Beban Penyisihan Piutang dari Kelebihan Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang terdiri dari:

- Tunjangan Kinerja PNS sebesar Rp1,417
- Tunjangan Kinerja PPPK sebesar Rp264
- Uang Makan PNS sebesar Rp31,120
- Uang Makan PPPK Rp3,514

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp852.235.564,00

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 852.235.564,00 dan Rp1.224.695.851.00

Defisit LO
Rp(9.084.087,059,00)

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 2025 dan 20234 adalah sebesar Rp(9.084.087.059,00) dan Rp(11.293.371.958,00) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Rp0

E.3. Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp47.400,00 dan yang merupakan koreksi pengembalian belanja pegawai Tahun 2023.

Transaksi antar entitas
Rp8.918.138.213,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.918.138.213,00 dan Rp10.920.864.271,00 Rincian transaksi antar entitas terdiri dari:

Tabel 36. Rincian Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas	Nilai
Diterima dari entitas lain	54.985.506
Ditagihkan ke entitas lain	8.002.955.219
Transfer masuk	
Transfer keluar	
Pengesahan hibah langsung TAYL	970.168.500
Pengesahan Pengembalian	
Hibah Langsung	
Jumlah	8.918.138.213

E.4.1.Diterima dari Entitas Lain (DDEL) / Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari entitas lain/ditagihkan ke entitas lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada /KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp58.250.678 sedangkan DKEL sebesar Rp10.979.114.949

Ekuitas Akhir
Rp686.286.718,00

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing – masing sebesar Rp686.286.718,00 dan Rp852.235.564,00

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA SEMESTER II TAHUN 2025

Tidak ada penjelasan mengenai kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Pada Saat Catatan atas Laporan Keuangan ini di buat, Dalam Aplikasi MON Sakti sudah tidak terdapat To Do List.
2. terdapat selisih rekonsiliasi internal di Modul Rekonsiliasi Monsakti pada pengungkapan lainnya.

No	Nilai Neraca	Nilai Subledger	Selisih
1	686.323.033	679.060.051	7.262.982

Nilai Rp7.262.982,00 merupakan pengembalian Tunjangan Kinerja PPPK, Uang Makan PPPK, Uang Makan PNS dan Tunjangan Kinerja PNS pada Tahun 2025 yang disetorkan ke kas negara pada tahun 2026. Nomor NTPN 55EB58N3F5TFVCB7 Tanggal 02 Januari 2026. Sesuai PMK 232 Tahun 2022 Halaman 102 Pengembalian belanja TAYL yang tidak menghasilkan BMN melalui setoran ke kas negara. Untuk kondisi ini, satker kami telah mengakui adanya piutang lainnya dan pengurangan beban pada laporan keuangan dengan melakukan jurnal manual pada SAKTI modul GLP. Jurnal yang dibuat sebagai berikut:

115212	Piutang Lainnya	6.224.000	-
511129	Beban Uang Makan PNS	-	6.224.000
115212	Piutang Lainnya	702.850	-
511628	Beban Uang Makan PPPK	-	702.850
115212	Piutang Lainnya	283.315	-
512411	Beban Tunjangan Kinerja PNS	-	283.315
115212	Piutang Lainnya	52.817	-
512414	Beban Tunjangan Kinerja PPPK	-	52.817

Dan kami telah melakukan jurnal penyesuaian khusus pada modul GLP dengan jurnal sebagai berikut:

594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	31.120	-
116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	-	31.120
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	3.514	-
116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	-	3.514
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	1.417	-
116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	-	1.417
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	264	-
116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	-	264

Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2026, berdasarkan bukti setor ke kas negara dengan NTPN 55EB58N3F5TFVCB7 Tanggal 02 Januari 2026 mencatat pada modul bendahara sehingga terdapat jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

313121	Diterima dari Entitas Lain	7.262.982	-	LPE
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	7.262.982	LO
313121	Diterima dari Entitas Lain	7.262.982	-	-
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	7.262.982	LRA

Selanjutnya untuk mengeliminasi piutang lainnya yang telah disajikan dalam laporan keuangan TAYL, satker kami melakukan jurnal pada modul GLP sebagai berikut

425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	7.262.982	-
115212	Piutang Lainnya	-	7.262.982

F.2.2. PENGESAHAN HIBAH JASA TAYL

Pada Semester I tahun 2025 satker BBRSEKP Menerbitkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) Nomor B.483/BBRSEKP/KP/440/III/2025 Tanggal 19 Maret 2025

**SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG
BENTUK JASA**

NOMOR : B.483/BBRSEKP/KP.440/III/2025

TANGGAL : 19 MARET 2025

Yth. Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah
Jakarta

Bersama ini disampaikan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Jasa sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan hibah yang diterima berupa Jasa dengan rincian sebagai berikut:

Penerima Hibah

Bagian Anggaran/Eselon I : (12) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kode dan Nama Satker : (403836) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Pemberi Hibah

Negara Pemberi Hibah : Lembaga Internasional
Nama Pemberi Hibah : *Food and Agriculture Organization (FAO)*
Nama Proyek : *Mainstreaming Biodiversity Conservation and Sustainable Use into Inland Fisheries Practices in Freshwater Ecosystems of High Conservation Value (IFish)*

Nomor & Tanggal Perjanjian Hibah : GCP/INS/303/GFF, tanggal perjanjian hibah 20 Juni 2023
Nilai Hibah : USD 61.754,16

Rincian Pendapatan Hibah

Nomor Register : 2Z5GG3BA
Nilai Realisasi Hibah : Jasa: US\$ 61.754,16 atau Rp970.168.500 (periode November 2023 - Juni 2024)

Bentuk Hibah : ☐ Barang ☒ Jasa ☐ Surat Berharga

Akun : 391133

Jakarta, 19 Maret 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Balai Besar Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan,



A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani
NIP. 197204102002122003

Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk jasa tahun anggaran yang lalu sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp970.168.500,- yang merupakan hibah langsung berupa jasa yang telah di sahkan dengan SPM nomor 00147a tanggal 17 April 2025 dan nomor Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL) dengan nomor 823177464997170783 tanggal 17 April 2025 oleh KPPN Jakarta VI.

	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG / JASA / SURAT BERHARGA												
Nomor : 00147T Tanggal : 17-04-2025 Satker : 403836 - BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	KPPN : 175 - JAKARTA VI Tanggal : 17-04-2025 Nomor : 823177464997170783 Tahun Anggaran : 2025													
Telah disetujui pencatatan pendapatan hibah dan belanja pencatatan hibah sejumlah : <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%;">Saldo awal</td> <td style="width: 20%;">: Rp</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">970.168.500</td> </tr> <tr> <td>Belanja</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">970.168.500</td> </tr> <tr> <td>Saldo Akhir</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>			Saldo awal	: Rp	0	Pendapatan	: Rp	970.168.500	Belanja	: Rp	970.168.500	Saldo Akhir	: Rp	0
Saldo awal	: Rp	0												
Pendapatan	: Rp	970.168.500												
Belanja	: Rp	970.168.500												
Saldo Akhir	: Rp	0												
Yaitu : Pengesahan dan Pencatatan Hibah Langsung Luar Negeri berupa Jasa Tahun 2024 kegiatan Mainstreaming Biodiversity Conservation and Sustainable Use into Inland Fisheries (IFish) sesuai dokumen perjanjian hibah Nomor GCP/INS/303/GFF Tanggal 20 Juni 2023														
 JAKARTA PUSAT, 21-04-2025 Kuasa Bendahara Umum Negara Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi														

Satker merekam dokumen Persetujuan MPHL-BJS pada Aplikasi SAKTI melalui menu Transaksi > Daftar MPHL-BJS dan Persetujuan MPHL-BJS:

No.	Pendapatan		Belanja		Nilai
1	391133	Pengesahan Hibah TAYL	522191	Belanja Jasa Lainnya	970,168,500

F.2.3. SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA ANGGARAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Nomor KEP 16/PA/2025 tentang Perubahan Ketujuh Puluh Dua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran Nomor: KEP.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) lingkup Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Novi Susetyo Adi, ST, M.Si

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.527/KPA/BRSDM-BBRSEKP/KU.111/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Maka susunan Pengelola Anggaran lingkup Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Pejabat Pembuat Komitmen : Fahru Rachman, SE., M.M

Pejabat : Heny Lestari, SE

Penandatanganan/Penguji

SPM

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.453/KPA/BBRSEKP/KU.510/III/2024 Tentang tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.38/KPA/BBRSEKP/KU.510/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Maka susunan Pengelola Anggaran lingkup Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Bendahara Pengeluaran : Dede Nurfattah Ardiansyah, A.Md.Ak

Bendahara Gaji : Fahrunnisa, A.Md.Ak